



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 2800-2809

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Pengamanan Brimob Dalam Merespons Konflik Sosial Dan Menjaga Stabilitas Keamanan Di Papua

Kamaruddin Kamaruddin<sup>1✉</sup>, Sunardi Purwanda<sup>2</sup>, Ardiyanti Aris<sup>3</sup>, Wiwin Wiwin<sup>4</sup>, Auliah Ambarwati<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [kamaruddin9222@gmail.com](mailto:kamaruddin9222@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Papua merupakan wilayah dengan kompleksitas konflik sosial yang tinggi, dimana dinamika keamanan menurut strategi pengamanan yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengamanan yang diterapkan oleh Brimob dalam merespons konflik sosial dan menjaga stabilitas keamanan di Papua, khususnya melalui Operasi Damai Cartenz 2023 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Brimob menggabungkan pendekatan taktis, preventif dan humanis, serta pendekatan sosial terhadap masyarakat. Strategi ini dinilai efektif dalam menekan eskalasi konflik bersenjata dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Brimob dalam pengamanan di Papua tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga dengan pendekatan sosial adaptasi terhadap dinamika lokal.

Kata Kunci : *Brimob, Konflik Sosial, Operasi Damai Cartenz, Papua, Strategi Pengamanan*

## Abstract

Papua is a region with a high level of social conflict complexity, where security dynamics are governed by adaptive security strategies. This study aims to analyze the security strategies implemented by the Mobile Brigade Corps (Brimob) in responding to social conflict and maintaining security stability in Papua, specifically through the 2023 Carstensz Peace Operation in Pegunungan Bintang Regency. This study uses empirical legal research and a conflict approach. The results indicate that the Brimob strategy combines tactical, preventive, and humanist approaches, as well as a social approach to the community. This strategy is considered effective in suppressing the escalation of armed conflict and increasing community participation in maintaining security. The conclusion of this study indicates that the Brimob's success in securing Papua is determined not only by its armed strength but also by its social approach adapted to local dynamics.

Keywords: Brimob, Social Conflict, Carstensz Peace Operation, Papua, Security Strategy

## PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah paling timur Indonesia yang secara resmi bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 19 November 1969 melalui hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang kemudian diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, Papua menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari ketimpangan pembangunan, kemiskinan, hingga konflik sosial yang berkepanjangan. Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, namun realitas sosial-ekonominya menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara potensi dan kesejahteraan (Mustawa, dkk., 2022) masyarakat lokal (Purwanda, 2024).

Dalam konteks ini, teori konflik dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika sosial yang terjadi, dimana ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan politik saling berinteraksi dengan identitas budaya yang kuat. Teori konflik seperti yang dikemukakan oleh (Ralf Dahrendorf, 1929- ) memberikan pemahaman bahwa konflik sosial adalah akibat dari struktur ketimpangan kekuasaan dan eskresi terhadap kelompok tertentu. Sementara teori pembangunan strukturalis menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak inklusif justru memperlebar kesenjangan dan memicu resistensi sosial.

Kelompok separatis, baik dalam bentuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun gerakan politik yang mendesak referendum, menambah kompleksitas konflik. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketidakpuasan ini dipicu oleh faktor ideologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta pelanggaran hak asasi manusia yang semakin memperburuk kondisi keamanan (Syafrizal, dkk., 2024; LIPI, 2017; Chandra, dkk., 2022).

Penanganan konflik selama ini cenderung menggunakan pendekatan militeristik yang

menimbulkan resistensi dari masyarakat, serta menambah sorotan internasional terhadap isu-isu HAM di Papua. Brimob Polri sebagai satuan elite yang dilibatkan dalam Operasi Damai Cartenz dalam struktur Polri memiliki peran sentral dalam penanganan konflik bereskalasi tinggi, namun efektivitas pendekatan yang diterapkan, baik secara taktis maupun humanis, masih memerlukan evaluasi. Terlebih, masih terbatasnya studi yang secara khusus menilai strategi pengamanan Brimob dari perspektif sosial-hukum dan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat lokal.

Memahami strategi operasional dan pendekatan sosial Brimob menjadi penting dalam upaya membangun keamanan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks negara hukum, strategi penegakan keamanan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga mengintegrasikan metode preventif dan humanis dalam pelaksanaan tugas.

Sebagian besar studi sebelumnya fokus pada analisis konflik dari sisi politik atau HAM, sementara kajian yang secara khusus mengevaluasi strategi pengamanan Brimob dalam konteks Papua masih terbatas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pegunungan Bintang, salah satu wilayah yang menjadi titik fokus dalam Operasi Damai Cartenz. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya intensitas konflik dan keterlibatan aktif aparat keamanan, termasuk Brimob, di wilayah tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya tertentu yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas konflik di seluruh wilayah Papua. Dinamika konflik di daerah pegunungan berbeda dengan wilayah pesisir atau perkotaan seperti Jayapura, Timika, dan Wamena yang memiliki struktur sosial, kepadatan penduduk, serta pola interaksi masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, hasil temuan dari lokasi ini bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh. Penelitian lanjutan di lokasi-lokasi lain dengan karakteristik yang beragam sangat diperlukan guna memberikan gambaran yang lebih holistik dan representatif mengenai strategi pengamanan dan dinamika konflik di Papua secara keseluruhan.

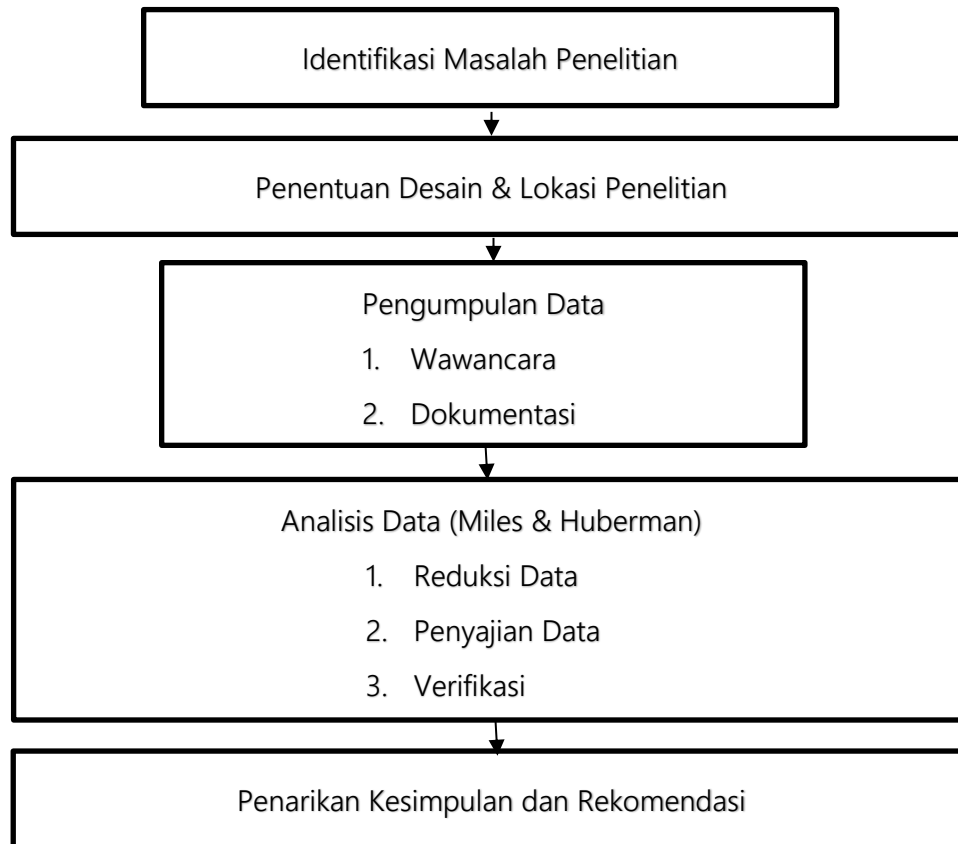
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengamanan yang diterapkan oleh Brimob dalam merespons konflik sosial (Purwanda, 2014) dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Brimob di lapangan, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang praktis, kontekstual, dan sensitif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Papua.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu menelaah persoalan konflik sosial dan strategi pengamanan Brimob dalam konteks Operasi Damai Cartenz di Papua. Setelah masalah dirumuskan, peneliti menentukan desain dan lokasi penelitian, yakni pendekatan hukum empiris dengan lokasi utama di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan fokus pada dinamika konflik sosial dan strategi pengamanan Brimob dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz. Lokasi penelitian utama berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, salah satu wilayah yang menjadi titik rawan konflik. Namun, peneliti menyadari bahwa keterbatasan lokasi ini mungkin belum sepenuhnya mewakili kompleksitas konflik di seluruh wilayah Papua. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan dapat diperluas melalui studi lanjutan di daerah lain dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam terhadap personel Brimob, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terhadap dokumen operasional, regulasi terkait dan data sekunder lainnya. Namun untuk memperkaya perspektif analisis, ke depan perlu dilibatkan lebih banyak partisipan dari kalangan masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh konflik, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan representatif.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi, yang bertujuan memberikan kontribusi praktis dan akademik terhadap upaya peningkatan efektivitas strategi pengamanan di Papua.

Fokus analisis tidak hanya pada strategi yang digunakan, tetapi juga pada dampak jangka panjang, baik positif maupun negatif, terhadap kondisi sosial masyarakat dan stabilitas keamanan. Dalam menyusun rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi prinsip-prinsip HAM, serta penyusunan langkah implementatif yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Diharapkan pendekatan ini dapat mengurangi resistensi masyarakat, membangun kepercayaan terhadap institusi keamanan, dan mendorong terciptanya keamanan yang inklusif dan berkelanjutan.



Beberapa kasus yang ditangani oleh satuan Brimob pada Operasi Damai Cartenz 2023 khususnya di Pegunungan Bintang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi ruang gerak KKB melalui kombinasi operasi militer taktis dan penegakan hukum intensif. Beberapa kasus diantaranya yaitu aksi kontak tembak dengan KKB yang menewaskan beberapa korban baik dari pihak KKB sendiri, TNI-POLRI, warga sipil. Aksi kontak tembak dan pengejaran anggota KKB berhasil menekan jumlah pelaku serta meningkatkan jumlah proses hukum, senjata dan amunisi yang diamankan. Penegasan terhadap isu kehadiran aparat juga menandai adanya upaya membangun kepercayaan publik dan membendung narasi negatif terhadap operasi. Total operasi pengamanan yang dilakukan pada Operasi Damai Cartenz 2023 secara keseluruhan meningkat signifikan dibanding pada operasi tahun sebelumnya.

Strategi pengamanan yang diterapkan Brimob dalam merespons konflik sosial di Papua dilaksanakan melalui pendekatan taktis, preventif, dan humanis. Secara taktis, Brimob diturunkan dalam kerangka Operasi Damai Cartenz untuk menanggulangi gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) yang sering melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. Dalam konteks ini, Satuan Brimob menjaga stabilitas keamanan dengan melakukan penjagaan di wilayah rawan, penyeragaman terhadap senjata ilegal, serta pembebasan sandera.

Penempatan pasukan dilakukan berdasarkan peta kerawanan konflik di wilayah seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan prioritas pengamanan objek vital, jalur distribusi logistik, dan fasilitas publik. Kemudian strategi penyusunan rencana operasi disusun berdasarkan hasil pemetaan dan data intelijen, mencakup penempatan personel, logistik, serta skenario taktis menghadapi potensi konflik. Pelaksanaan operasi lapangan juga selalu dilaksanakan melalui patroli rutin serta pendekatan humanis seperti dialog dengan masyarakat dan kegiatan sosial. Satuan Brimob juga menekankan evaluasi taktis terhadap respons masyarakat terhadap kehadiran aparat, hal tersebut dilakukan agar menghindari konflik lanjutan akibat pendekatan yang tidak tepat. Strategi ini bertujuan membangun kepercayaan publik (*trust building*) sekaligus meminimalkan potensi konflik berbasis prasangka dan provokasi. Operasi tidak hanya berbasis kekuatan senjata, tetapi mengutamakan penguasaan medan dan pemahaman konteks sosial-budaya lokal. Namun, keterbatasan wilayah operasi yang hanya mencakup Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi catatan penting. Lokasi ini tidak sepenuhnya merepresentasikan keragaman konflik di seluruh Papua, yang memiliki kompleksitas berbeda di wilayah pesisir maupun perkotaan seperti Jayapura, Mimika, dan Nabire. Oleh karena itu, penelitian di lokasi lain dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap efektivitas strategi pengamanan Brimob di berbagai konteks.

Dari sisi pendekatan sosial, Brimob juga dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan dan penggalangan masyarakat, seperti bakti sosial, pelayanan kesehatan, serta komunikasi dengan tokoh adat dan agama serta melibatkan masyarakat yang berdampak langsung oleh konflik yang terdampak langsung oleh konflik melalui survei kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dan diskusi terbuka di beberapa lokasi terdampak. Survei ini menggali pengalaman, persepsi serta kebutuhan warga termasuk korban konflik bersenjata, perempuan dan tokoh adat terhadap kehadiran aparat keamanan dan situasi keamanan di wilayah mereka. Hasil dari survei ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai kondisi sosial di lapangan dan menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengamanan yang lebih adaptif dan humanis. Namun demikian, analisis terhadap strategi pengamanan yang digunakan masih perlu pendalaman, terutama terkait dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. Perlu dievaluasi apakah pendekatan taktis ini mampu membangun perdamaian berkelanjutan, atau justru menciptakan ketakutan dan memperkuat ketegangan antara masyarakat dan aparat. Di sinilah pentingnya menyeimbangkan pendekatan represif dengan strategi preventif dan humanis yang berbasis pada HAM dan keadilan sosial.

Selain itu, dalam kerangka penegakan hukum, Brimob menjalankan fungsinya sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal menjaga ketertiban masyarakat dan menanggulangi gangguan keamanan berkadar tinggi. Strategi ini ditopang oleh kemampuan taktis seperti penjinakan bom, pembubaran massa, hingga pengamanan terhadap serangan bersenjata yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok separatis.

Oleh karena itu, Brimob mulai menerapkan model pengamanan partisipatif dengan memasukkan unsur sosial dalam strategi operasionalnya. Hal ini mencerminkan teori pendekatan konflik yang menyatakan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan sosial merupakan penyebab utama konflik (Collins, 1975). Strategi Brimob yang berupaya menyentuh aspek sosial masyarakat Papua merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas tersebut. Pendekatan ini juga mendukung prinsip-prinsip negara hukum, di mana penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk mengendalikan, tetapi juga melindungi dan memberdayakan warga negara.

Strategi Brimob yang berupaya menyentuh aspek sosial masyarakat Papua merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas tersebut. Pendekatan ini juga mendukung prinsip-prinsip negara hukum, di mana penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk mengendalikan, tetapi juga untuk melindungi dan memberdayakan warga negara.

Lebih jauh, penting untuk menempatkan pelanggaran HAM sebagai isu sentral dalam strategi pengamanan. Keberadaan laporan-laporan terkait kekerasan terhadap warga sipil dan pelanggaran hak asasi perlu ditindaklanjuti dengan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi operasi keamanan. Integrasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahapan operasi dapat mengurangi resistensi masyarakat dan memperbaiki citra institusi keamanan di mata publik.

Melalui pendekatan taktis, preventif, dan humanis, satuan Brimob dalam Operasi Damai Cartenz telah menunjukkan sejumlah capaian dalam upaya mereduksi gangguan keamanan di wilayah rawan konflik seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun, efektivitas strategi keamanan tidak dapat hanya diukur dari penurunan aktivitas kelompok bersenjata, melainkan juga dari sejauh mana strategi tersebut mampu menyentuh dimensi sosial yang lebih dalam dan meredam akar penyebab konflik secara berkelanjutan.

Dalam konteks Papua, konflik yang terjadi tidak hanya bersifat horizontal atau sektoral, tetapi memiliki akar historis dan struktural yang kompleks. Sejarah politik integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, trauma masa lalu yang belum sepenuhnya dipulihkan, serta ingatan kolektif masyarakat terhadap kekerasan negara, telah membentuk rasa ketidakpercayaan dan jarak sosial antara masyarakat dan negara. Selain itu, dominasi

budaya luar dalam sistem pendidikan, ekonomi, dan administrasi lokal juga turut menciptakan alienasi sosial, di mana masyarakat Papua merasa tidak memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri dalam kerangka pembangunan nasional.

Pendekatan historis dan antropologis sangat penting untuk menggali bagaimana masyarakat Papua memaknai kehadiran aparat keamanan dan negara. Dalam banyak kasus, kegagalan untuk memahami realitas lokal dan konteks budaya telah menyebabkan strategi keamanan justru memperkuat resistensi dan memperdalam luka sosial. Oleh karena itu, strategi pengamanan ke depan tidak hanya membutuhkan keahlian taktis, tetapi juga sensitivitas sosial dan budaya yang tinggi.

Implikasi dari analisis ini menunjukkan bahwa strategi pengamanan yang bersifat represif perlu dilengkapi dengan pendekatan rekonsiliatif dan partisipatif, yang mengedepankan keadilan, pengakuan identitas lokal, dan pemulihan hubungan negara-masyarakat. Hanya dengan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh, negara dapat membangun sistem keamanan yang tidak hanya menekan konflik secara sementara, tetapi juga menciptakan perdamaian yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Strategi pengamanan brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2023 menunjukkan pendekatan adaptif berbasis taktis dan humanis dalam merespons konflik sosial di Papua. Penelitian ini memajukan pemahaman bahwa keberhasilan stabilisasi keamanan bergantung pada sinergi antara kekuatan represif dan pendekatan sosial. Justifikasi ilmiah ini membuka ruang untuk mengembangkan model keamanan berbasis partisipatif di wilayah konflik. Penelitian lanjutan disarankan agar dilakukan kajian kuantitatif terhadap efektivitas pendekatan humanis Brimob serta menilai persepsi masyarakat terhadap kehadiran aparat. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah studi ke beberapa distrik lain yang memiliki karakteristik konflik berbeda guna memperoleh komparasi strategi.

## DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2018). *Don't bother, just let him die: Killing with impunity in Papua*.

<https://www.amnesty.org>

Andi Septiadi, M., Sofa, N. G., Syarah, S., Shakira, W., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, & Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (n.d.). Kekejaman KKB Papua yang melanggar HAM. <https://doi.org/10.29103/jspm.v%vi%i.7453>

Anwar Hidayat, Z., Arafat, Z., & Nursidik. (2022). Tinjauan yuridis peran Brigade Mobil (Brimob) dalam menangani konflik bersenjata di wilayah Papua dihubungkan dengan

- Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 13–39. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2293>
- Chandra, F. K., Niklas, H., Haikal, M., & Ocktavia, S. (2022). Analisis konflik HAM yang terjadi di Papua. *Jurnal Nusantara*, 1(1), 62–77. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2010). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2017). *Permasalahan Papua: Rekomendasi untuk Solusi Damai dan Komprehensif*. Jakarta: LIPI Press.
- Mustawa, Mustawa, Abd Haris Hamid, and Sunardi Purwanda. "Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law." *Amsir Law Journal* 4.1 (2022): 51-61.
- Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To win the heart and mind the people of Papua: Fungsi dan peran Brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 211–223. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22481>
- Purwanda, Sunardi, et al. "LEGAL PROTECTION OF YEI PEOPLE'S KNOWLEDGE OF LOCAL MEDICINES AND MEDICINAL PLANTS FROM EXTINCTION." *Masalah-Masalah Hukum* 53.3: 245-256.
- Purwanda, Sunardi. "Model Penanggulangan Konflik Dalam Perspektif Socio-legal (studi Kasus Tawuran Mahasiswa Dikota Makassar) Conflict Management Model in Socio-legal Perspective (Study Case of Student Brawl in Makassar)." *Law Reform* 10.1 (2014): 125-152.
- Sriwidodo, J., & Kn, M. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafrizal, Syafrizal, Fikri Aulia Akmal, and Sunardi Purwanda. "Human Rights Review on Age Limitation of Candidates for Regional Heads." *Amsir Law Journal* 6.1 (2024): 21-27.
- Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi teori hukum pidana dalam perkembangan ilmu hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>
- Yanto, O. (2020). *Penegakan Hukum dalam Konteks Negara Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Irian Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.